

# **PROGRAM KARTU TANI: ANALISIS HAMBATAN DARI PERSPEKTIF INTEREST GROUP DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2023**

Hafiizh Sufi Anbiya - 14010120140167  
Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Pemerintahan FISIP,  
Universitas Diponegoro, Semarang - Indonesia

## **ABSTRAK**

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Wilayah Indonesia yang luas dan hasil pertanian yang melimpah, perlu dilakukan proses distribusi pupuk subsidi yang aman agar memenuhi kebutuhan pupuk di setiap wilayah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu program kartu tani. Kartu tani adalah fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai akses layanan perbankan, dapat berfungsi sebagai simpanan, kartu subsidi, dan penyaluran pinjaman. Proses pelaksanaan program kartu tani mengalami beberapa hambatan sehingga penyaluran pupuk subsidi masih belum tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Hambatan Politik Kebijakan Program Kartu Tani: Tinjauan Teori Interest Group (Studi Kasus Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023). Penelitian ini ingin mengetahui siapa aktor-aktor pelaksanaan kartu tani di Kabupaten Majalengka dan hambatan apa saja yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teori *Interest group* dari David B Truman dalam bukunya "The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion" (1951) dengan empat variabel dan Faktor hambatan dari Sunggono Bambang (1994: 151). Teori tersebut tersebut berguna untuk mencari bias politik dalam kebijakan dengan menemukan kelompok kepentingan yang terlibat dalam politisasi kebijakan beserta hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif untuk mengobservasi secara langsung ke lapangan serta mengeksplorasi dari subjek yang berhadapan langsung dengan objek Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan adanya bias politik dan kecurangan yang dibuat oleh kelompok kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat membelakangi kios pengecer dan Lurah yang menjual pupuk subsidi keluar wilayah edarnya. Adapun hambatan kartu tani seperti tumpang tindih kewenangan antar pelaksana kebijakan, Hambatan-hambatan dalam mengakses kartu tani seperti proses perbaikan mesin EDC yang lama, proses perbaikan kartu tani jika rusak terlalu kompleks oleh pihak bank karena tidak dapat di wakikan. Kondisi fenomena *double* salur sehingga petani dalam korupsi atas kuota pupuk dan kios pun menjadi kekurangan pupuk.

Kata kunci: Kelompok Kepentingan, Pupuk Subsidi, Kartu Tani, Hambatan, Penyaluran.

## **ABSTRACT**

*Subsidized fertilizer is a government-controlled commodity regulated by law. Given Indonesia's vast area and abundant agricultural output, a secure distribution process for subsidized fertilizer is necessary to meet the needs in every region. The government has introduced the farmer card program as a policy measure. The farmer card is a facility provided by the government that serves as access to banking services, functioning as a savings account, subsidy card, and loan distribution channel. The implementation process of the farmer card program has faced several obstacles, resulting in the distribution of subsidized fertilizer not reaching the intended targets. The purpose of this study is to analyze the Political Obstacles of*

*the Farmer Card Program Policy: An Interest Group Theory Review (Case Study of Subsidized Fertilizer Distribution in Majalengka District, 2020-2023). This research aims to identify the actors involved in the implementation of the farmer card in Majalengka District and the challenges they face. The study utilizes the Interest Group theory by David B. Truman from his book "The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion" (1951), employing four variables and the Barrier Factors by Sunggono Bambang (1994: 151). This theory is useful for identifying political bias in policies by discovering the interest groups involved in the politicization of policies and the obstacles to policy implementation. A qualitative method is used for direct field observations and exploration from subjects directly interacting with the object. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of this research prove that there is political bias and fraud created by interest groups such as the People's Representative Council turning their backs on retail kiosks and village heads who sell subsidized fertilizer outside their distribution area. There are obstacles to farmer cards such as overlapping authority between policy implementers, obstacles in accessing farmer cards such as the process of repairing EDC machines taking a long time, the process of repairing farmer cards if they are damaged is too complex for the bank because they cannot be represented. The condition of the double channel phenomenon means that farmers are corrupted over fertilizer quotas and kiosks also become short of fertilizer.*

*Keywords: Interest Group, Subsidized Fertilizer, Farmer Card, Challenges, Distribution*

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian menjadi sebuah potensi besar bagi negara Indonesia dalam menyokong pertumbuhan dan pembangunan. Menurut Kementerian Pertanian pada pandemi covid-19, Kuartal IV 2020 sektor pertanian tumbuh sebanyak 2,59 persen, tanaman pangan salah satunya padi menjadi pendukung sebesar 10,47 persen (Tempo.co, 2021). Peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan tanaman pangan adalah sub sektor dari sektor pertanian. Produk yang paling menonjol di Indonesia yaitu beras.

Besarnya produksi padi pada setiap daerah, tentunya menjadi keuntungan bagi pemerintah dan perlu dijaga stabilitas produksinya. Pupuk termasuk barang yang strategis karena kaitannya dengan peningkatan pendapatan dan produksi para petani. Kontribusi sektor pertanian juga untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pupuk, harga dan benih merupakan permasalahan utama dari kesejahteraan petani (Dahiri, 2018). Kebijakan pupuk subsidi membuat harga asli dari harga pupuk menjadi lebih rendah sehingga menstimulan para petani memakai dosis sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi.

Program kartu tani dirilis pada tahun 2017 dibawah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, tetapi kartu tani

baru berjalan efektif pada Januari 2021 oleh Menteri Pertanian Yasin Limpo. Jumlah Petani di Kabupaten Majalengka yang menggunakan pupuk berjumlah 130.106 menurut data Sensus Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian Tahun 2023 Kabupaten Majalengka sedangkan menurut Iman Firmansyah selaku kepala DKP3 Kabupaten Majalengka menyebutkan terdapat 160.000 orang yang menggunakan kartu tani pada tahun 2023.

Polemik kartu tani tidak hanya mengenai implementasi, banyak faktor yang mempengaruhi problematika di dalamnya. Ada indikasi intervensi dari faktor politik seperti politisasi kebijakan hingga praktik korupsi, suap, monopoli dan adanya mafia pupuk. Indikasi masalah tersebut dapat membuat pelaksanaan kebijakan kartu tani menjadi terhambat dan sulit untuk berjalan optimal. Peneliti ingin melihat Implementasi kartu tani di Masyarakat khususnya petani dalam distribusi penebusan pupuk subsidi.

Tugas pemerintah agar pupuk dapat diterima oleh petani sesuai dengan azas enam tepat meliputi tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu dan tepat harga. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, maksud azas 6 (enam) tepat itu adalah tepat tempat,

tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat waktu.

Politisasi kebijakan yang menimbulkan praktik penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran regulasi pasti berasal dari pribadi atau kelompok yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri atau kelompok. Kepentingan pribadi dan kelompok ini timbul karena adanya interest profit yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang.

Salah satu contoh kasus mafia pupuk subsidi yaitu yang terjadi di kebun dilansir oleh detik jateng tanggal 08 Oktober 2023. Kejadiannya berada pada Kecamatan Prembun, Mirit dan Bonorowo sepanjang 2021-2022. Distributor melakukan Tindakan korupsi melalui CV perusahaannya. Tersangka melakukan penjualan illegal diluar zona wilayah penjualan yang ditetapkan yaitu Kecamatan Prembun, Mirit dan Bonorowo sehingga mengakibatkan kelangkaan pupuk di sekedar wilayah tersebut.

Atas beberapa informasi dari redaksi berita diatas, dapat menjadi data pendukung yang valid bahwa praktik politik kebijakan benar terjadi adanya. Selain itu dari referensi jurnal dan skripsi yang peneliti cari, belum menemukan tentang masalah kebijakan program kartu tani yang menjelaskan dari sudut pandang faktor politik.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian yang berjudul " Program Kartu Tani: Analisis Hambatan Dari Perspektif Interest Group Di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023" ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang hasilnya peneliti dapat menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu dan individu lainnya, serta meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupannya sehingga informasi yang ada selanjutnya diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Adhi & Khoiro, 2019). Penelitian ini memperlihatkan fenomena politisasi pada kebijakan kartu tani dari perspektif kelompok kepentingan dan hambatan-hambatan program kartu tani di Kabupaten Majalengka.

Subyek dari penelitian ini yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Staff Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Penyuluh Pertanian Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kasokandel, Pengelola kios pupuk Kecamatan Jatiwangi, dan Petani Desa Ranjiwetan Kecamatan Kasokandel memiliki peranan penting sebagai informan

dalam memperoleh data terkait dengan penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian. Termasuk wawancara dengan instansi/instansi berwenang seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka terkait hambatan-hambatan dalam program kartu tani di Kabupaten Majalengka dan aktor-aktor kelompok kepentingan.

Menurut (Sugiyono.2014:137), Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data seperti dokumen, buku atau melalui orang. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, literatur, media online dan jurnal yang berhubungan dengan hambatan program kartu tani

## **HASIL PENELITIAN**

Penyebaran Informasi perlu dilakukan dengan menyesuaikan lawan bicara, siapa yang menjadi target sasaran kebijakan, pemerintah perlu mengadaptasi gaya komunikasi agar dapat diterima dengan mudah dipahami. Sistem birokrasi pemerintahan perlu merancang strategi penyebaran informasi agar dapat tersampaikan dengan baik. Stakeholders yang menjadi ujung tombak dalam penyebaran informasi kebijakan kartu tani

adalah ketua kelompok tani. Ketua Poktan (kelompok tani) perlu memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya kepada anggotanya tentang penggunaan kartu tani. Penyampaian informasi yang berjenjang dan panjang perlu diawasi dengan baik, jika tidak, hasilnya informasi akan terputus di salah satu aktor dan pelaksanaan kebijakan akan berlangsung kacau.

Peneliti melihat petani sudah melihat kinerja pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan kartu tani namun tidak melihat indikator-indikator keberhasilannya. Menurut peneliti salah satu indikator keberhasilan sosialisasi tersebut adalah ketika petani tidak bertanya kembali kepada PPL untuk penggunaan kartu tani. Sosialisasi secara berkala tidak perlu dilakukan karena hanya akan menghabiskan anggaran dinas untuk keperluan yang berulang. Petani tidak bertanya mengenai penggunaan kartu tani artinya para petani sudah memahami betul mekanisme kerja kartu tani.

Pengelolaan informasi perlu dilakukan secara dua arah antara pemberi dan penerima kebijakan. Perlu adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Aspirasi harus berupa dua arah

Teori Interest group digunakan pada penelitian untuk memberikan gambaran baru bagi khalayak umum bahwa kelompok kepentingan dapat berada pada

setiap proses kebijakan dan khususnya pada kebijakan kartu tani. Dunia yang semakin terpolarisasi dan Indonesia adalah negara demokrasi. Membuat pengambilan keputusan oleh pemerintah memuat banyak pertimbangan dari para kelompok-kelompok kepentingan.

Terdapat beberapa temuan yang berhasil di dapatkan dalam penelitian ini, tentang proses politik yang terjadi dalam kebijakan. Kompleksitas yang terjadi antar aktor dan politisasi kebijakan di temukan pada penelitian ini. Tidak hanya tentang hambatan secara teknis pada alat, namun terdapat politisasi saling tarik-menarik pada kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan.

Peneliti menemukan beberapa hambatan yang sama seperti penelitian terdahulu. Berdasarkan wawancara dengan narasumber peneliti, permasalahan secara teknis timbul dan menjadi problematika yang serius di kalangan petani. Misalnya menurut Kasiami Sri (2020), Melakukan penelitian dengan judul Hambatan-Hambatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020. Jurnal tersebut meneliti mengenai hambatan kartu tani menggunakan metode kualitatif dan menggunakan konsep teori hambatan. Peneliti sepakat bahwa sama seperti yang ditemukan pada jurnal tersebut bahwa isi kebijakan sudah baik namun

hanya pada penerepannya seperti sarana dan prasana yaitu kartu tani belum terdistribusi secara menyeluruh dan alokasi pupuk subsidi yang sangat kurang jika merujuk kepada jumlah alokasi pupuk bersubsidi di e-RDCK. Peneliti menemukan hal yang sama bahwa sarana dan prasarana yang dibuat belum terdistribusi secara menyeluruh contoh seperti mesin EDC yang error dan perbaikannya lama. Mesin EDC yang tidak dapat menangkap sinyal karena wilayah kios pengecer pupuk berada di daerah yang sulit menangkap sinyal.

Jurnal lainnya Gunawan Endro, Sahat Pasaribu, (2020), Penelitian tersebut untuk mendapatkan persepsi petani dalam implementasi program kartu tani untuk mendukung distribusi pupuk bersubsidi. Menyebutkan beberapa permasalahannya seperti Kesulitan penggunaan kartu tani, pemakaian kartu yang belum diwajibkan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, petani yang belum bankable, tambahan biaya angkut dan masalah pada mesin Electronic Data Capture. Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil temuan dari peneliti seperti petani yang belum bankable sehingga memperlambat proses penebusan pupuk subsidi karena petani yang malas mengurus permasalahan bank. Sosialisasi dari pemerintah yang kurang efektif dan kreatif sehingga petani malas untuk datang bahkan mendengarkan

ketika sosialisasi berlangsung dan masalah pada mesin EDC yang dapat mempengaruhi penebusan pupuk subsidi karena waktu perbaikannya yang lama hingga 2 minggu lamanya.

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh petani, belum menemukan penelitian tentang kebijakan kartu tani dalam penyaluran pupuk subsidi yang meneliti menggunakan perspektif bias politik. Rata-rata penelitian lain yang membahas kebijakan kartu tani menggunakan teori implementasi kebijakan yang outputnya akan berbicara mengenai hambatan secara teknis dan pelaksanaannya saja.

Penelitian ini menggunakan teori interest group sehingga dapat memberikan sudut pandang baru dalam meneliti kebijakan kartu tani dalam penyaluran pupuk subsidi. Politisasi yang dilakukan oleh stakeholders dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya dapat diteliti karena memiliki implikasi yang besar bagi keputusan kebijakan kartu tani. Peran kelompok kepentingan menarik untuk dikaji dalam melihat proses politik yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan. Temuan seperti adanya para pemilik CV distributor adalah anggota dewan yang bermain untuk meningkatkan elektabilitas, kemudian adanya praktik abuse of power yang dilakukan pejabat pemerintah dengan menjual kembali pupuk subsidi diluar

wilayah edarnya bahkan petani sendiri yang mengambil hak serta jatah pupuk subsidi orang lain untuk digunakan secara pribadi. Temuan tersebut tidak ada pada penelitian lainnya.

Lokasi dan kondisi dilapangan juga berpengaruh terhadap hasil penelitian, metode yang dipakai peneliti adalah kualitatif sehingga menyesuaikan dengan kondisi dan situasi subjek penelitian. Fenomena yang terjadi adalah hasil dari observasi secara langsung dilapangan dan berdasarkan data sekunder literatur jurnal, berita dan buku.

Kebijakan kartu tani memiliki masalah dalam beberapa hal karena keterlibatan aktor pada kebijakan ini cukup banyak dan bervariasi dari berbagai kalangan. Tata kelola informasi sebagai kunci koordinasi keberhasilan kartu tani, hambatan-hambatan teknis dan non teknis pada kartu tani, terdapat keterlibatan aktor informal yang dapat mempengaruhi kebijakan kartu tani serta bentuk-bentuk negosiasi dan advokasi petani dalam memberikan aspirasi untuk kebijakan kartu tani dalam penyaluran pupuk subsidi.

Masalah yang muncul berasal dari beberapa aktor informal maupun formal yang mengintervensi kebijakan. Para aktor ini dapat menjadi kelompok kepentingan yang hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau kelompok sehingga mengganggu proses jalannya

kebijakan. Pengaruh kelompok kepentingan tersebut mempolitisasi kebijakan dan menjadi hambatan bagi pelaksanaan kebijakan kartu tani.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Menteri pertanian yaitu Andi Amran Sulaiman, sudah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022, bahwa petani tahun 2024 bisa menebus pupuk subsidi hanya dengan menggunakan KTP dibuktikan dengan postingan Kementerian Pertanian di Instagram Kementerian Pertanian tanggal 29 Desember 2023. Kebijakan program kartu tani dalam distribusi pupuk subsidi adalah program gagal yang dilakukan pemerintah, selama keberjalanannya dari 2017 hingga sekarang tidak ada kemajuan bahkan akan dihapuskan.

Kesulitan dalam penelitian ini yaitu sulitnya untuk mendapatkan jawaban yang empiris terkait fenomena dan situasi di lapangan secara akurat karena pembahasan memiliki sentiment tersendiri, narasumber menyembunyikan faktanya sehingga menjawab secara normatif dan banyaknya subjek di lapangan sehingga perlu menganalisis dari berbagai perspektif yang berbeda.

Mobilisasi, variabel ini melihat dari bentuk kelompok-kelompok kepentingan untuk saling mengajak menggunakan kebijakan.

Berdasarkan temuan di lapangan. sosialisasi yang dilakukan masih kurang beragam dan kurang variatif karena pemerintah memberikan pernyataan bahwa petani tidak mudah menerima informasi tentang kebijakan kartu tani. kios merasa kecewa dengan pihak bank yang tidak begitu responsif dalam menerima keluhan. Artikulasi. Temuannya dari setiap kelompok kepentingan mengungkapkan masalahnya sendiri, petani bilang bahwa pupuknya langka dan habis padahal sebetulnya itu karena mereka membawa seluruh kuota pupuk pada kartu tani. Petani menyampaikan keresahannya kepada PPL wilayah binaannya setelah itu dilakukan musyawarah untuk mencapai Solusi. Kios mengeluhkan terjadi dobel salur pupuk subsidi karena KTP dan Kartu Tani tidak terintegrasi dalam satu sistem sehingga tidak sinkron. Agenda Setting, temuan dari variabel ini melihat adanya pengaturan dalam kebijakan kartu tani oleh kelompok kepentingan yang memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Terdapat orang di belakang kios pupuk subsidi itu adalah anggota dewan perwakilan rakyat dan pemilik CV distributor itu adalah dewan perwakilan rakyat. Terdapat kelompok oknum lurah yang menjual pupuk subsidi keluar wilayah edar yaitu kecataman. Negosiasi dan Kompromi, temuannya terdapat masalah teknis mesin EDC rusak, kartu tani hilang

dan rusak, proses perbaikannya lama sekali karena hanya ada satu orang call center bank mandiri yang mengurus kartu tani sehingga selalu PPL yang menghubungi pihak bank agar di percepat.

Terdapat ketidaksesuaian isi peraturan dengan dilapangan bahwa fenomena dobel salur penebusan antara kartu tani dengan mesin EDC dan T-Pubers yang tidak saling sinkron. Informasi, pemerintah mengeluhkan respon dari penerima kebijakan yang lambat yaitu petani, selain itu sulitnya mengumpulkan petani dalam satu tempat dan satu waktu selain itu petani tidak berminat dan bahkan tidur saat sosialisasi. Dukungan, Perbaikan mesin EDC hingga 1-2 minggu yang membuat petani telat mendapatkan pupuk subsidi. Pembagian potensi, kewenangan yang terbagi kepada beberapa instansi dan tim membuat sulitnya pengambilan keputusan dalam suatu masalah. DKP3, Dinas Perdagin dan bank memiliki wewenangnya masing-masing dan sulit untuk duduk bertiga jika ada masalah karena dibatasi oleh wewenangnya masing-masing untuk mengeksekusi sebuah Keputusan.

### **Saran**

Penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan kartu tani dalam penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Majalengka menggunakan teori interest group. Peneliti mendapatkan

tantangan dan hambatan saat melaksanakan penelitian sehingga perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan dari tantangan yang dihadapi oleh peneliti. terdapat beberapa saran dan rekomendasi dari peneliti kepada para aktor dan stakeholders yang terlibat dalam kebijakan kartu tani. Banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Saran yang diberikan peneliti yaitu:

1. Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang subjektif membuat peneliti cukup kesulitan dalam menentukan waktu dan suasana yang pas dalam melakukan pengambilan data primer melalui wawancara sehingga narasumber dapat terpengaruhi oleh suasana. Perlu independensi peneliti dalam meningkatkan objektivitas dan temuan di lapangan agar penelitian dapat berjalan sesuai harapan. Perlu dilakukan observasi secara menyeluruh dari setiap fenomena agar mendapat bukti yang lebih konkret dan akuntabel. Sikap persuasif peneliti saat melakukan wawancara perlu dilakukan karena untuk mendapat respon narasumber yang tepat sasaran.

2. Setiap kelompok kepentingan perlu melakukan kolaborasi yang aktif untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas suatu kebijakan. Kelompok-kelompok kepentingan wajib mendahului kepentingan publik diatas kepentingan pribadi.

Pemerintah, swasta dan masyarakat perlu meningkatkan intensitas duduk bersama untuk merancang strategi dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kebijakan.

3. Pemerintah perlu melakukan revisi besar-besaran terhadap kebijakan kartu tani karena selama penyelenggaraannya jauh dari kata baik. Pemerintah perlu memberikan sebuah terobosan baru untuk mekanisme penebusan pupuk subsidi bukan kembali memakai KTP sehingga menimbulkan masalah yang sama seperti sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanti. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar).
- Agindawati1, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi Volume 10 | Nomor 1 | April 2019*. Retrieved from file:///C:/Users/BPN/Downloads/Implementasi\_Kebijakan\_Publik\_dari\_Perspektif\_Peny.pdf
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2)*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: ALFABETA,cv.
- Ahmad Abdurrahman Wahid1, S. G. (n.d.). Problematika Implementasi Program Kartu Tani Di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 0, Nomor 0 (0000): 000-000*.
- Andini, M. S. (2020, April). Analisis Ringkas Cepat Tantangan dan Perkembangan Kebijakan Anggaran Subsidi Pupuk. *No. 05/arc.PKA/IV/2020*. Retrieved from <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-29.pdf>
- Antaraneews. (2021, April 5). *Baru 5,03 persen petani gunakan Kartu Tani untuk dapat pupuk subsidi*. Retrieved from Antara: <https://www.antaraneews.com/berita/2081794/baru-503-persen-petani-gunakan-kartu-tani-untuk-dapat-pupuk-subsidi>
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2022). *Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2020-2022*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/indicator/53/1498/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>
- Basuki, N. M. (n.d.). Persepsi Petani (Pengguna Kartu Tani) Terhadap Kebijakan Program Kartu Tani Di Kecamatan Batang Batang Sumenep. *Seminar Nasional Optimalisasi Sumberdaya Lokal di Era Revolusi Industri 4.0*. Retrieved from <https://ejournalwiraraja.com/index.php/PROSD/article/view/855/777>

- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cirebon, D. K. (2020, Desember 15). *Kartu Tani Tidak Diberlakukan untuk Pembelian Pupuk Bersubsidi*. Retrieved from Kabar Cirebon: <https://www.kabarcirebon.com/2020/12/15/kartu-tani-tidak-diberlakukan-untuk-pembelian-pupuk-bersubsidi/>
- D, R. N. (2003). *Kebijakan Publik formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dahiri. (2020). Analisis Kritis Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan. *Jurnal Budget VOL. 5, NO. 2*, 137-149.
- Darwin, M. (2003). *Pengantar ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Edisi Kedua*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Devi Nurulfahmi, M. (2020). Persepsi Petani Terhadap Implementasi Kartu Tani (Studi Kasus Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang). *AGRISEP Vol. 19 No. 2 September 2020*, 315 - 330. Retrieved from <file:///C:/Users/BPN/Downloads/ri dharrn,+315-330+Devinurul.pdf>
- Dinas Kominfo Jawa Timur. (2020, September 08). *Kartu Tani, Identitas Petani untuk Akses Pupuk dan Bantuan Pemerintah*. Retrieved from Kominfo Jawa Timur: <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kartu-tani-identitas-petani-untuk-akses-pupuk-dan-bantuan-pemerintah>
- Dr. Umar Sidiq, M. D. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. (M. Dr. Anwar Mujahidin, Ed.) Ponorogo: CV. Nata Karya. Retrieved maret 02, 2024, from <https://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>
- Edward C. Page, M. L. (2015). *The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration*. OUP Oxford.
- Endro Gunawan<sup>1\*</sup>, S. P. (2020). Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 28, No. 2, 2020*. Retrieved from <file:///C:/Users/BPN/Downloads/477-Article%20Text-2398-2-10-20211109.pdf>
- Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang: FISIP UNDIP.
- Fenti Yunita, R. A. (n.d.). Peran Penyuluh Pertanian Dalam Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.
- Fidianing Sopah, W. K. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *Vol. 2, No. 6, Juni 2020*. Retrieved from <https://www.jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/339/320>
- Harjanti, W. (2011). Pengaruh Perkembangan Konsep

- Kepentingan Umum. *Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia*, 95-99. Retrieved from file:///C:/Users/BPN/Downloads/aa m19,+6.WIWIK+HARJANTI.pdf
- Heksantoro, R. (2023, 10 05). *Korupsi Subsidi Rp 8,6 M, Mafia Pupuk Kebumen Jadi Tersangka*. Retrieved from detikjateng: <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6966720/korupsi-subsidi-rp-8-6-m-mafia-pupuk-kebumen-jadi-tersangka/1>
- Indonesia, M. P. (2021). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*. Retrieved from file:///C:/Users/BPN/Downloads/Permentan%20Nomor%2041%20Tahun%202021.pdf
- Indonesia, P. R. (n.d.). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan*. Retrieved from file:///C:/Users/BPN/Downloads/Perpres\_no\_15\_2011.pdf
- Indonesia, P. R. (n.d.). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan*. Retrieved from file:///C:/Users/BPN/Downloads/PERPRES%20NO%2077%20TH%202005.pdf
- Kasiam, S. (2020). *Hambatan-Hambatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Kabupaten Bojonegoro*. *JIAN – Volume 4No 1, Februari 2020*. Retrieved from <http://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN/article/view/363/331>
- Kementrian Pertanian Republik Indonesia. (n.d.). *Kartu Tani, Era Baru Sejahteraan Petani Indonesia*. Retrieved from KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA: <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2067>
- Kementrian Pertanian Republik Indonesia. (n.d.). *Musrenbangtan 2022, Mentan SYL Minta Perencanaan Sektor Pertanian Inovatif dan Adaptif*. Retrieved from Kementrian Pertanian Republik Indonesia: <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4953>
- Lidia Kamelia, M. V. (2022). *Analisis Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang*. *Volume IX Nomor 2,*, 289-297. Retrieved from file:///C:/Users/BPN/Downloads/307-Article%20Text-1359-1-10-20220526.pdf
- Mazwan3, R. S. (2022). *Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*. *Jurnal Kirana 2022Vol.3(2)*. Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jkrn/article/view/33349/11999>
- Menteri Pertanian Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang*

- Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020*. Retrieved from <http://ditlin.tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/PERMENTAN%20NOMOR%202001%20TAHUN%202020%20e d.pdf>
- Meristika, Y. S. (2017, November 30). *Portal Resmi Provinsi Sumatera Barat*. Retrieved February 21, 2024, from Enam Strategi Kementerian Pertanian Dalam Regenerasi Petani: <https://sumbarprov.go.id/home/news/12705-enam-strategi-kementerian-pertanian-dalam-regenerasi-petani>
- Miles, M. B. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mohamad Iin Musbihin, W. G. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kabupaten Majalengka*. Majalengka: BPS Kabupaten Majalengka.
- NEWS CNBC INDONESIA. (2024, Maret 21). *Video: Persoalan Pupuk Subsidi, Alokasi Kurang & Distribusi Bermasalah*. Retrieved from CNBC INDONESIA: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240321090746-8-523957/video-persoalan-pupuk-subsidi-alokasi-kurang-distribusi-bermasalah>
- Notohadiprawiro, I. E. (2006). Peranan Pupuk Dalam Pembangunan Pertanian. *Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)*.
- Pahlapi, E. (2023, Maret 15). *Disinyalir Banyak yang Tidak Memiliki Sawah, Namun Kartu Tani di Tangan, DKP3 Majalengka Siap Tertibkan KT*. Retrieved from Kabar Cirebon: <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2936423744/disinyalir-banyak-yang-tidak-memiliki-sawah-namun-kartu-tani-di-tangan-dkp3-majalengka-siap-tertibkan-kt?page=all>
- Pewaris Padjajaran. (2024, Januari 15). *PETANI KELUHKAN KELANGKAAN PUPUK,Pj BUPATI MAJALENGKA DEDI SUPANDI SIDAK KE KIOS PUPUK*. Retrieved from Pewaris Padjajaran: <https://pewarispadjaran.com/2024/01/15/petani-keluhkan-kelangkaan-pupuk-pj-bupati-majalengka-dedi-supandi-sidak-ke-kios-pupuk/>
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2010, Oktober 15). *UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*. Retrieved Maret 02, 2024, from Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif: <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Pusparisa, Y. D. (2023, Agustus 21). *Kompas id*. Retrieved February 2024, 2024, from Sektor Pertanian Berisiko Tinggi akibat Perubahan Iklim: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/21/sektor-pertanian-berisiko-merugi-hadapi-cuaca-ekstrem>
- Ramdhani1, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12, 1-12*.

- Retrieved from <http://digilib.uinsgd.ac.id/5116/1/2017-Konsep%20Umum%20Pelaksanaan%20Kebijakan%20Publik.pdf>
- Ramlawati. (2020). Peranan Sektor Pertanian Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. *Volume 1, No. 2, 2020*, 173-193.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani*. Retrieved from <file:///C:/Users/BPN/Downloads/UU%20Nomor%2019%20Tahun%202013.pdf>
- Richi Agung Ervanto<sup>1</sup>, I. T. (2022). Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bekasi. *Juni Vol. 1 No. 2, pp. ISSN: 2303-0194, E-ISSN: 2615-1308*, 338-355.
- Riki<sup>1</sup>), Abdal<sup>2</sup>), & Abdillah<sup>3</sup>), W. S. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021. *Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 2 No. 2, 2022*.
- Roby Darmawan, M. E. (2022). *Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2022*. (S. M. Mas'ud, Ed.) Jakarta, Jakarta, Indonesia: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian. Retrieved Februari 21, 2024, from [https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis\\_Kesejahteraan\\_Petani\\_2022.pdf](https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis_Kesejahteraan_Petani_2022.pdf)
- Rokim. (n.d.).
- Sandi, F. (2023, Desember 06). *Miris Petani RI, Anggaran Pupuk Subsidi 2024 Tak Sampai 50%*. Retrieved Maret 04, 2024, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231206122410-4-494957/miris-petani-ri-anggaran-pupuk-subsidi-2024-tak-sampai-50>
- Sidik Edi Sutopo, A. T. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Provinsi Jawa Barat Tahap 1*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Sitorus, E. A. (2023). *Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat 2022*. (I. E. Rohaeti, Ed.) Bandung, Jawa Barat: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Bara. Retrieved February 21, 2024, from <https://jabar.bps.go.id/publication/download.html?nrbfveve=OTU0ZjRmMjlmNmI5OThlMWYyYzU2O DU4&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWJhci5icHMuZ28uaWQvcHVibGJlYXRpb24vMjAyMy8wNS8yMi85NTRmNGYyOWY2Yjk5OGUxZjJjNTY4NTgvc3RhdGlzdGlrLW5pbGFpLXR1a2FyLXBldGFuaS1wcm92aW5zaS1qYXdhLWJhcm>
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute.
- Subagja, A. (2020, Agustus 11). *FEBI Universitas Muhamadiyah Kendari*. Retrieved from Peranan Generasi Milenial terhadap Industri Pertanian Masa Depan: <https://febi.umkendari.ac.id/home/berita/220/peranan-generasi->

milennial-terhadap-industri-  
pertanian-masa-depan#

Sukmana, Y. (2022, Februari 02). *Kementan: Kelangkaan Pupuk Subsidi Terjadi karena Jumlahnya Kurang*. Retrieved from KOMPAS.com: <https://money.kompas.com/read/2022/02/03/200023726/kementan-kelangkaan-pupuk-subsidi-terjadi-karena-jumlahnya-kurang>

Susilowati, S. H. (2016). Urgensi Dan Opsi Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk. *Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 14 No. 2, Desember 2016*: , 163-185.

Ufira Isbah, R. Y. (2016). Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun VII No.19, November*, 45 - 54. Retrieved from <file:///C:/Users/BPN/Downloads/4142-8180-1-SM.pdf>

Warella, Y. (2004). Kepentingan Umum Dan Kepentingan Perseorangan (Ditinjau dari aspek Kebijakan Publik). *JIAKP, Vol. 1, No. 3, September*, 381-391. Retrieved from <file:///C:/Users/BPN/Downloads/529-1027-1-PB.pdf>

Yulianto, E. (2023, Maret 14). *Stok Pupuk Bersubsidi di Majalengka Diklaim Aman, Kuota Sesuai dengan Kebutuhan*. Retrieved from Tribun Jabar.id: <https://jabar.tribunnews.com/2023/03/14/stok-pupuk-bersubsidi-di-majalengka-diklaim-aman-kuota-sesuai-dengan-kebutuhan>

ZP, R. I. (2022, Januari 06). *Petani di Majalengka Mulai Kesal, Pupuk Subsidi Kosong, Sementara yang Mahal Masih Tersedia*. Retrieved from ZonaPriangan.com: <https://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-463412461/petani-di-majalengka-mulai-kesal-pupuk-subsidi-kosong-mentara-yang-mahal-masih-tersedia?page=2>

**Makmur, ◆. ◆..** (2020, Februari). ANALISIS KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS PADI (*Oryza Sativa*) DI KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Volume 5, Nomor 1, Februari 2020*, <file:///C:/Users/BPN/Downloads/13316-31019-1-PB.pdf>.